

BAB II

RESPON JEPANG TERHADAP KONTESTASI POLITIK DI KAWASAN INDO-PASIFIK

2.1 Kontestasi Politik di Kawasan Indo-Pasifik

Banyak Negara di sekitar kawasan Indo-Pasifik atau di jauh dari Kawasan Indo-Pasifik menganggap Indo-Pasifik sebagai Kawasan yang penting bagi perekonomian atau hubungan antar negara. Dikarenakan Indo-Pasifik mempunyai peran yang penting bagi setiap negara maka persaingan politik di kawasan Indo-Pasifik tak dapat terelakan. Persaingan politik di wilayah Indo-Pasifik melibatkan interaksi antara berbagai kekuatan politik dan militer yang aktif di kawasan tersebut.²¹ Negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Australia dan Jepang telah terlibat dalam dinamika persaingan geopolitik di sana. Perubahan dalam norma interaksi global di wilayah Indo-Pasifik mencerminkan adanya persaingan antara kekuatan-kekuatan yang berbeda, Meskipun terdapat beragam pandangan dan kontroversi mengenai konsep Indo-Pasifik, wilayah ini tetap menjadi pusat perhatian utama dalam dinamika persaingan geopolitik global.

Jepang adalah pendukung awal konsep 'Indo-Pasifik'. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengusulkan 'berlian keamanan demokratik' yang terkenal, yang terdiri dari Australia, India, Jepang dan Amerika Serikat anggota asli dari Quadrilateral Security Dialogue (Quad) atau Dialog Keamanan Segiempat 2007. Pada tahun 2012 dan konsep ini tampaknya dihidupkan kembali dalam bentuk

²¹ Muhamad Jaki Nurhasya, "Konsepsi Indo-Pasifik Sebagai Sebuah Strategi Ketahanan Politik Luar Negeri Indonesia," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 6, no. 1 (2018): 65–76, <https://prosiding.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/116>.

'Quad 2.0' pada tahun 2017.²² Namun, 'strategi Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas Jepang yang diadopsi oleh Abe pada tahun 2016 pada saat ini lebih mencakup domain ekonomi serta keamanan, dengan menekankan pada hubungan ekonomi antara Asia dan Afrika, khususnya di bidang infrastruktur. Strategi FOIP versi Jepang bertujuan terutama untuk membentuk dan mengkonsolidasikan tatanan regional di kawasan Indo-Pasifik berdasarkan tatanan internasional berbasis aturan yang ada.

Saat ini komunitas Internasional sedang berada dalam titik balik sejarah dimana Kerjasama dan pembagian saling terkait secara rumit. Fumio Kishida selaku Perdana Menteri Jepang mengakui bahwa keseimbangan kekuatan sedang dalam fase bergeser dalam komunitas Internasional pada saat ini, contohnya ada pada Bangkitnya India yang semakin kuat menjadi salah satu alasannya. India sendiri memiliki kepentingan yang cukup signifikan di barat pasifik dan Laut Cina Selatan, Hal ini mencakup kepemilikan saham penting di ladang energi lepas pantai Sakhalin-I di Jauh Timur Rusia, Blok energi lepas pantai di Laut Cina selatan bekerja sama dengan Vietnam. Wilayah Indo-pasifik bagi India memiliki arti penting guna demi keamanan jalur komunikasi lautnya terutama untuk menghadapi strategi pertahanan aktif Tiongkok yang menyerukan pengendalian laut Hal ini dapat mendorong angkatan laut asing keluar sesuka hati untuk menciptakan gelembung anti-access/area denial (A2/AD) atau strategi militer yang mengontrol

²² K A I He and Mingjiang Li, 2020, *Understanding the Dynamics of the Indo-Pacific : US-China Strategic Competition, Regional Actors, and Beyond*, 1, no: 1-7. DOI:<https://doi.org/10.1093/ia/iiz242>

akses ke dan dalam lingkungan operasi.²³ Perdana Menteri India Narendra Modi menjabarkan visi dan elemen kebijakan India untuk Indo-Pasifik. Dalam pidatonya ia menyerukan tatanan terbuka dan inklusif di wilayah Indo-Pasifik yang berdasar penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah semua Negara.

Persaingan politik di wilayah Indo-Pasifik melibatkan interaksi antara berbagai kekuatan politik dan militer yang aktif di kawasan tersebut. Negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia terlibat dalam dinamika persaingan geopolitik di sana. Indonesia telah memperkenalkan konsep Indo-Pasifik sebagai bagian dari strategi politik luar negerinya, dengan tujuan mendorong inklusivitas, dialog, dan penyelesaian damai terhadap masalah-masalah regional. Perubahan dalam norma interaksi global di wilayah Indo-Pasifik mencerminkan adanya persaingan antara kekuatan-kekuatan yang berbeda, dan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas di kawasan tersebut. Meskipun terdapat beragam pandangan dan kontroversi mengenai konsep Indo-Pasifik, wilayah ini tetap menjadi pusat perhatian utama dalam dinamika persaingan geopolitik global.

Ditengah persaingan dari berbagai Negara, India membentuk sebuah wacana strategis kontemporer dan akan mempengaruhi ekonomi di Kawasan yang berdampak pada tatanan keamanan global. Wacana menjajikan yang melampaui bidang militer atau politik tradisional yang disebut dengan Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI). IPOI sendiri merupakan hasil murni dari inisiatif pemerintah India

²³ Harsh V. Pant and Abhijnan Rej, 2018, *Is India Ready for the Indo-Pacific?*, *Washington Quarterly* 41, no. 2: 47–61. DOI; <https://doi.org/10.1080/0163660X.2018.1485403>

dan dibangun berdasarkan inisiatif “Security and Growth for All in the Region” (SAGAR) atau keamanan dan pertumbuhan untuk semua di Kawasan. SAGAR mendorong negara-negara untuk bekerja sama dan mensinergikan upaya menuju lingkungan yang aman, terjamin, dan stabil. domain maritim serta mengambil langkah-langkah yang berarti untuk konservasi dan pemanfaatan domain maritim secara berkelanjutan. Pandangan IPOI berdasarkan pada teoritis liberal dan mendukung inisiatif global yang terbuka, inklusif serta tidak berlandaskan perjanjian untuk memitigasi tantangan khususnya di bidang maritime. Dengan adanya IPOI india mendotong negara-negara lain untuk berkontribusi dalam IPOI dan juga memimpin bidang tematik di bawah inisiatif IPOI ini.²⁴

Sejak lama Amerika Serikat Telah lama mengakui bahwa wilayah Indo-Pasifik merupakan wilayah yang penting bagi keamanan dan kesejahteraan AS. Berjalannya waktu telah menggarisbawahi pentingnya peran Amerika Serikat yang konsisten dan strategis. Pada akhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat mempertimbangkan namun menolak gagasan untuk menarik kehadiran militer AS. Memahami bahwa kawasan ini memiliki nilai strategis yang hanya akan tumbuh di abad ke-21. Dari dulu, pemerintahan kedua partai politik telah berbagi komitmen terhadap wilayah tersebut. George W.Bush Pemerintah AS memahami semakin pentingnya Asia dan menjalin hubungan erat dengan Tiongkok, Jepang, dan India.²⁵

²⁴ I Indian Council of World Affairs, 2022, *Indo-Pacific Ipoi Oceans Initiative:Towards a Sustainable and Prosperous Indo-Pacific Region*, no: 1–132. Diakses dari <https://www.icwa.in/pdfs/IndoPacificOceansInitiative.pdf>. (20/02/2024. 18.45 WIB)

²⁵ K A I He and Mingjiang Li, 2020, *Understanding the Dynamics of the Indo-Pacific : US–China Strategic Competition, Regional Actors, and Beyond*, 1, no: 1–7. DOI:<https://doi.org/10.1093/ia/iiz242>

Pemerintahan Obama secara signifikan mempercepat penentuan prioritas Amerika Asia, menginvestasikan sumber daya diplomatik, ekonomi, dan militer baru di sana. Dan Pemerintahan Trump juga mengakui Indo-Pasifik sebagai pusat gravitasi dunia. Lalu saat ini berada dibawah kepemimpinan Biden AS bertekad untuk memperkuat posisi dan komitmen jangka Panjang terhadap Indo-Pasifik. AS akan berfokus pada semua penjuru Kawasan, dari Asia Timur dan Asia Tenggara, hingga Asia Selatan dan Oseania termasuk Kepulauan Pasifik. Fokus AS yang semakin intensif ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Indo-Pasifik saat ini sedang menghadapi tantangan yang semakin besar, Khususnya dari Tiongkok.²⁶

Tujuan AS di Indo-Pasifik tersebut dicantumkan dalam 5 poin Strateginya. Lima Strategi AS tersebut adalah: Majukan Indo Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Menurut AS kepentingan Vital mereka berada pada AS memerlukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Hal ini mencakup mendukung masyarakat terbuka dan memastikan pemerintah Indo-Pasifik dapat membuat keputusan politik yang independent dan bebas tanpa ada paksaan dan AS akan melakukan investasi pada lembaga-lembaga demokratis, pers yang bebas dan masyarakat sipil yang dinamis. Melalui poin ini AS akan meningkatkan kemudahan dan kebebasan informasi serta berekspressi sejalan dengan strategi AS dalam melawan korupsi dan mendorong reformasi dan melakukan perbaikan transparansi fiskal di Indo-Pasifik untuk meningkatkan kolaborasi dan mendorong angka korupsi. Strategi AS kedua adalah dengan membangun Koneksi di Dalam dan di Luar Wilayah. Upaya ini dimulai

²⁶ The White House, 2022, *Indo-Pacific Strategy of the United States*, The White House. no: 1–19. Diakses dari: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>. (15/03/2024. 19.15 WIB)

dengan aliansi dari kemitraan terdekat AS yang diperbarui melalui cara-cara yang inovatif. AS akan memperdalam aliansi regional dengan Australia, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, Taiwan, Vietnam serta Kepulauan Pasifik. Strategi ketiga AS adalah meningkatkan kesejahteraan Indo-Pasifik. Bersama dengan mitra-mitra AS, AS akan mengajukan kerangka ekonomi Indo-Pasifik.²⁷

AS akan mengajukan kerangka ekonomi Indo-Pasifik kemitraan multilateral untuk abad ke- 21. Kerangka kerja ekonomi ini akan membantu perekonomian kita memanfaatkan transformasi teknologi yang pesat, termasuk ekonomi digital, dan beradaptasi dengan transisi energi dan iklim yang akan datang. Strategi keempat meningkatkan keamanan Indo-Pasifi. AS akan membina hubungan keamanan di Kawasan Indo-Pasifik termasuk akan menemukan peluang guna menghubungkan industri pertahanan. Strategi kelima sekaligus menjadi strategi terkahir adalah membangun ketahanan Daerah terhadap ancaman transnasional abad 21. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan para mitranya untuk mengembangkan target, strategi, rencana, dan kebijakan pada tahun 2030 dan 2050 yang konsisten dalam membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius, dan akan berupaya untuk menjadi mitra pilihan ketika kawasan ini bertransisi menuju net- zero. masa depan.²⁸

Istilah Indo-Pasifiik digunakan sebagai konsep geopolitik secara

²⁷ Anna A. Kireeva, 2020. *The Indo-Pacific in the Strategies of the U.S. and Japan Common and Distinctive Features, Implications for Russia*, *Russia in Global Affairs* 18, no. 3: 98–127. Diakses dari: <https://eng.globalaffairs.ru/wp-content/uploads/2020/09/098-127.pdf> (01/02/2024. 21.15 WIB)

²⁸ The White House, 2022, *Indo-Pacific Strategy of the United States*, The White House. no: 1–19. Diakses dari: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>. (15/03/2024. 19.15 WIB)

kontemporer, namun Australia menggunakan Indo-Pasifik sebagai makalah kebijakan pemerintah untuk membingkai wilayah yang lebih luas. Defence White Paper (DWP) yang diterbitkan pada februari 2016 dibentuk untuk memandangi 20 tahun kedepan. DWP mengidentifikasi terdapat enam pendorong utama untuk membentuk lingkaran strategis Australia, yaitu kerja sama dan persaingan Tiongkok-AS; tantangan terhadap tatanan berbasis aturan; terorisme; kelemahan Negara; modernisasi; dan ancaman baru yang kompleks dan non geografis termasuk serangan siber.²⁹ DWP sendiri bertujuan untuk memperkuat peningkatan hubungan keamanan dengan AS dan mitra lainnya. Pada bulan November 2017 Foreign Policy White Paper (FPWP) diterbitkan dan mengadopsi dari 10 tahun DWP dan dikembangkan dari DWP.³⁰

FPWP dikembangkan dengan mempertimbangkan kepentingan lama Australia termasuk pembangunan Negara-Negara tetangga di Kepulauan Pasifik. FPWP akan berfokus pada mewujudkan Indo-pasifik yang aman dan terbuka dan sejahtera, sekaligus memperkuat dan melakukan diversifikasi kemitraan di Seluruh penjuru dunia. FPWP Australia berfokus pada tiga elemen. Pertama, aliran bebas barang dan jasa antar pasar terbuka, untuk memaksimalkan potensi daerah kesejahteraan dan keamanan pasokan. Kedua, kebebasan navigasi dan penerbangan, menjaga jalur komunikasi laut terbuka khususnya di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia yang merupakan beberapa titik maritim terpenting di dunia. Ketiga, kebebasan dari penggunaan kekuatan atau paksaan, baik melalui

²⁹ Thomas Wilkins and Jiye Kim, 2022, *Adoption, Accommodation or Opposition? - Regional Powers Respond to American-Led Indo-Pacific Strategy*. Pacific Review 35, no.3: 415–445. DOI: <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1825516>.

kekuatan senjata, operasi 'zona abu-abu', atau alat geo-ekonomi.³¹

2.2 Posisi Politik Jepang di Kawasan Indo-Pasifik

Jepang Merupakan Salah satu Negara yang peduli dan melihat bahwa Kawasan Indo-pasifik merupakan Kawasan yang penting dan strategis untuk jalur perdagangan maupun hubungan antar Negara. Dalam sejarah modern saja Jepang telah menjadi Inspirasi bagi Negara-negara di Kawasan Asia, dibawah Visi “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” (FOIP) yang di cetuskan oleh Shinzo Abe yang akhirnya dianut oleh Amerika Serikat dan Negara-negara lain. Secara keseluruhan Pemerintah Jepang Menekankan bahwa FOIP ini timbul bukan dengan alasan strategi pembendungan tiongkok, melainkan rancangan yang berbasis aturan yang inklusif untuk integrasi regional. Jepang mulai tegas menetapkan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka sebagai pendekatan yang dapat bertahan dari perubahan.

2.2.1 Arti penting Kawasan Indo-Pasifik bagi Jepang

Kawasan Indo-Pasifik memiliki kepentingan yang signifikan bagi Jepang, terutama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan energi. Dalam bidang ekonomi Kawasan Indo-Pasifik berada diantara pasar utama Jepang dan Amerika Serikat dan juga memberikan akses baru bagi jalur perdagangan lainnya. Jepang juga berencana memberikan dana public dan swasta sebesar 75 US\$ miliar sebagai bantuan infrastruktur dan investasi di Indo- pasifik pada tahun 2030.³² Dalam bidang

³¹ Parliament, European.,2022., *Australia’ s Strategic View of the Indo-Pacific*. European Parliament Research Service. Diakses dari: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698917/EPRS_BRI\(2022\)698917_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698917/EPRS_BRI(2022)698917_EN.pdf) (12/02/2024. 17.18 WIB)

³² Raisina Debates, 2023. *Japan ’s New Indo-Pacific: A Guiding Perspective to Shape Worldviews*, n.d. Diakses dari <https://www.orfonline.org/expert-speak/japans-new-indo-pacific-a-guiding-perspective-to-shape-worldviews> (15/05/2023. 19.20 WIB)

keamanan kawasan Indo-Pasifik menghadapi berbagai masalah stabilitas seperti pusat dari modernisasi kekuatan militer dan peningkatan aktivitas militer di wilayah ini. visi dari FOIP sendiri mencerminkan komitmen Jepang untuk untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Kawasan ini. Dalam bidang energi, Kawasan Indo-Pasifik memiliki sumber energi yang besar, termasuk minyak dan gas alam. Jepang memainkan peran utama dalam ketahanan energi dengan memajukan pendekatan bauran energi yang seimbang, memperluas energi baru dan terbarukan sekaligus memanfaatkan gas alam dan batu bara yang ramah lingkungan.

Kepentingan Jepang di Kawasan Indo-pasifik membuat Jepang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip keterbukaan, inklusivitas dan aturan hukum internasional di Indo-pasifik. Jepang secara aktif mencoba memainkan peran sentral dikawasan Indo-Pasifik dalam mengelola dinamika yang semakin kompleks di kawasan ini. Selama dekade terakhir diplomasi Jepang telah mencerminkan kehadiran baru China dan realitas persaingan kekuatan yang semakin meningkat di Kawasan Asia. Jepang menghadapi tantangan keamanan, termasuk persaingan global, ketidakpatuhan terhadap tatanan internasional, dan sengketa wilayah.³³ Oleh karena itu, Jepang berupaya untuk memainkan peran kepemimpinan dalam mempromosikan nilai pembuatan aturan dan kepatuhan internasional. Sekitar lebih dari 90% perdagangan Jepang bergantung pada jalur komunikasi laut, yang menambah urgensi Jepang dalam memastikan keamanan

³³ Sahashi and Michael Green, 2019, *The Indo-Pacific in Japan's Foreign Policy*, no. January: 1–11. Ryo. Diakses dari: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/FINAL_Working%20Paper_Ryo%20Sahashi.pdf. (27/04/2023. 18.20 WIB)

di Indo-Pasifik. Jepang menganggap sangat penting bagi kawasan Indo-Pasifik untuk menggalang pertumbuhan dan saling ketergantungan ekonomi yang didasarkan pada aturan dan norma umum. Secara esensial, gagasan tentang Indo-Pasifik mencerminkan aspirasi Jepang untuk membangun ketertiban regional.

Terdapat beberapa perubahan dalam geopolitik, termasuk kerjasama antara China dan Rusia dalam proyek pipa gas alam Power of Siberia, bagian energi dari Inisiatif Belt and Road (BRI), serta kekhawatiran umum terhadap ketidakstabilan di Timur Tengah, menjadi faktor yang mendorong Jepang dan AS untuk menggunakan sumber daya diplomatik, keuangan, dan energi mereka sebagai respons terhadap perkembangan tersebut. Pada bulan November 2017, Amerika Serikat memulai dua inisiatif kerja sama energi besar: Japan–United States Strategic Energy Partnership (JUSEP) atau Kemitraan Energi Strategis Jepang–Amerika Serikat dan Kemitraan Keamanan Energi antara Washington dan Seoul. Tujuan kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan energi serta bekerja sama dalam investasi infrastruktur energi di wilayah tersebut. Langkah-langkah ini dianggap sebagai awal dari strategi "keamanan energi bersekutu" yang menggabungkan kerja sama keamanan energi dengan pengembangan infrastruktur berkualitas tinggi di negara-negara ketiga sambil juga membantu meningkatkan permintaan Liquefied Natural Gas (LNG) dalam sektor pembangkit listrik.³⁴

³⁴ Jeffrey B, 2020, *Japan, Foip, and the Geopolitics of Energy in the Indo-Pacific*. Diakses dari: https://sppga.ubc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/Kucharski_Japan-FOIP-Geopolitics-Indo-Pacific.pdf (20/05/2023. 20.19 WIB)

2.2.2 Kebijakan Jepang di Kawasan Indo-Pasifik

Sebagai negara perdagangan kepulauan dan menganut paham pasifisme, fokus pada bidang maritime Jepang tidak menghilang sejak usainya Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II usai, Jepang berhasil mengembangkan industri pembangunan kapal komersial dan sector perikanan yang menjadi salah satu yang terdepan di Dunia Namun, dalam beberapa dekade terakhir, akibat dari merasa semakin terbatas oleh ekspansi maritim China, Jepang telah meninjau kembali posisinya regionalnya dan dalam prosesnya, Jepang telah ikut membentuk kembali pandangan global.³⁵

Strategi Jepang untuk wilayah Indo-Pasifik didasarkan pada faktor struktural dan peran penting Kawasan Indo-Pasifik oleh Jepang. Sejak awal tahun 2000-an, kebijakan luar negeri Jepang telah salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan kekuatan Tiongkok, terutama dalam ranah militer. Jepang sendiri sering dianggap sebagai pionir dalam memperkenalkan konsep Indo-Pasifik melalui pidato 'Confluence of the Two Seas' pada tahun 2007 oleh Perdana Menteri Abe di hadapan parlemen India.³⁶ Meskipun ada penundaan dalam tindak lanjut lembaga Jepang karena Abe kehilangan jabatan setelahnya, konseptualisasi tersebut memberikan dasar intelektual bagi realitas strategis yang sedang berkembang. Setelah kembali ke jabatan Perdana Menteri pada tahun 2012, mulai

³⁵ Hiroyuki Suzuki, 2020, *Japan's Leadership Role in a Multipolar Indo-Pacific*. Center for Strategic & International Studies. Diakses dari: <https://www.csis.org/analysis/japans-leadership-role-multipolar-indo-pacific> (27/03/2024. 16.00 WIB)

³⁶ Prime Minister of Japan 1 Kishida Fumio, 2023. *The Future of the Indo-Pacific Japan's New Plan for a 'Free and Open Indo-Pacific*. no. 3. Diakses dari; <https://www.mofa.go.jp/files/100477791.pdf> (22/01/2024. 21.42 WIB)

ada penekanan yang lebih kuat lagi pada visinya mengenai FOIP, termasuk pembentukan tim di Kementerian Pertahanan pada bulan Juni 2020 untuk mempelajari isu Indo-Pasifik.³⁷

Inti dari strategi Indo-Pasifik Jepang terletak pada aspek ekonomi, khususnya dalam mengidentifikasi dan memperluas sektor-sektor lintas sektoral yang memungkinkan Jepang untuk menggantikan China sambil menciptakan keamanan regional. Dua diantaranya adalah sektor energi dan infrastruktur. Strategi sektor energi sudah diuraikan dengan baik menggabungkan beberapa sektor energi sudah diuraikan dengan baik, menggabungkan berbagai elemen, termasuk permintaan administrasi Trump kepada Jepang untuk mengurangi ketimpangan perdagangan AS-Jepang. Adanya asumsi bahwa Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair akan menjadi lebih penting di Indo-Pasifik, terutama sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada batu bara; kekhawatiran tentang ketergantungan pada China untuk pasokan energi dan/atau kontrol infrastruktur energi krusial; serta keinginan untuk menjaga jalur laut tetap terbuka dan bebas, bukan hanya bagi Jepang, tetapi juga bagi wilayah tersebut.³⁸

Strategi-strategi ini mendorong keputusan kebijakan bahwa Jepang harus fokus untuk menjadi pusat pasokan LNG utama untuk wilayah tersebut. Itu akan memungkinkannya untuk membeli LNG dari AS dan mengurangi ketidakseimbangan perdagangan, memberi konsumen regional alternatif selain China,

³⁷ Cleo Paskal, 2021, *Indo-Pacific Strategies, Perceptions and Partnerships: The View from Seven Countries. Energy, Environment, and Resources Programme and Asia-Pacific Programme*, Chatham House, no: 53. Diakses dari: <https://royaloceaniainstitute.org/2021/03/25/indo-pacific-strategies-perceptions-and-partnerships/> (22/05/2023. 22.00 WIB)

³⁸ Ibid.

mendukung pembuatan kapal Jepang, dan meningkatkan pasar untuk Jepang, teknologi dan teknisi LNG.³⁹ Strategi ini juga akan memberi semua pihak yang terlibat kepentingan untuk menjaga jalur laut tetap terbuka dan, jika yang terburuk terjadi, maka akan memberi Jepang kemampuan untuk menarik kembali armada dagang dengan pasokan LNG tersisa untuk menambah cadangan strategis Jepang. Kebijakan tersebut diresmikan selama kunjungan Trump November 2017 ke Jepang, ketika kedua pemimpin meluncurkan Kemitraan Energi Strategis Jepang-Amerika Serikat atau Japan-United State Strategic Partnership (JUSEP).⁴⁰

Sejak ditetapkannya JUSEP Jepang dan sektor swastanya telah membelanjakan sekitar \$10 miliar dan telah berkomitmen untuk berinvestasi atau membiayai \$10 miliar lebih banyak dalam rantai pasokan energi, sebagian besar di Indo-Pasifik. Efeknya sudah terlihat. Pada 2016, Jepang mengimpor 11,14 miliar kaki kubik LNG dari AS; pada 2019 menjadi 201 miliar kaki kubik.⁴¹ Bagian utama JUSEP adalah area fokus Jepang lainnya untuk Indo-Pasifik, Infrastruktur, masalah keamanan nasional yang diakui, tetapi yang dapat melibatkan Jepang dengan 'secara damai. Jepang memiliki reputasi yang baik dalam membangun infrastruktur regional berkualitas tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan persaingan yang berkelanjutan, transparan, dan dibangun dengan baik untuk proposal China,

³⁹ Hiroyuki Suzuki, 2020, *Japan's Leadership Role in a Multipolar Indo-Pacific*. Center for Strategic & International Studies. Diakses dari: <https://www.csis.org/analysis/japans-leadership-role-multipolar-indo-pacific> (27/03/2024. 16.00 WIB)

⁴⁰ The White House, 2017. *President Donald J. Trump's Summit Meeting with Prime Minister Shinzo Abe of Japan*,. Diakses dari: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>.(27/03/2024. 16.45 WIB)

⁴¹ U.S Energy Information EIA Administration, 2022, *U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Point of Exit*, Diakses dari https://www.eia.gov/dnav/ng/NG_MOVE_POE2_A_EPG0_ENG_MMCF_A.htm (01/02/2024. 18.03 WIB)

termasuk bekerja sama dengan mitra. Untuk membangun kehadirannya di Indo-Pasifik, Jepang bersedia membiayai proyek-proyek yang tampaknya lebih berisiko dan lebih besar, seperti proyek LNG-to-power di Jawa di Indonesia.⁴²

2.3 Kebijakan Free Open Indo-Pacific sebagai Kebijakan Jepang di Kawasan Indo-Pasifik

Visi strategis Jepang terkait dengan konsep FOIP, di sisi lain, memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar memperhatikan kepentingan vital nasionalnya. Meskipun visi tersebut terkait dengan keamanan nasional Jepang dan pertimbangan strategis jangka panjangnya, tidak selalu berkaitan dengan keharusan strategis langsung, meskipun berfungsi sebagai pelengkap pertahanan Jepang. Visi untuk kawasan Indo-Pasifik ini memiliki jangkauan geografis yang terlalu luas bagi Jepang untuk sepenuhnya berkomitmen pada setiap aspeknya, mengingat keterbatasan diplomasi, ekonomi, dan aset militer negara tersebut.

2.3.1 Proses Pembentukan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) oleh Jepang

Istilah 'Indo-Pasifik' pertama kali muncul dalam wacana politik internasional pada tahun 2007 dalam sebuah artikel oleh peneliti India Gurpreet Khurana. Kawasan ini didefinisikan sebagai ruang maritim yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Pasifik barat yang berbatasan dengan semua negara di Asia (termasuk Asia Barat, atau Timur Tengah) dan Afrika Timur. Dilanjutkan pada tahun 2010-an Strategi Kebijakan Luar Negeri dan publikasi pakar di banyak negara mulai memberikan perhatian yang lebih pada Kawasan trans-regional di sepanjang

⁴² Japan bank for Internatioanl Cooperation, 2018, *Project Financing for Jawa 1 Gas-to-Power Project in Indonesia*. Diakses dari <https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2018/1022-011485.html>. (15/01/2024. 20.45 WIB)

pantai Samudra Hindia dan Pasifik. Pada tahun 2013, Australia untuk pertama kalinya secara resmi memasukkan konsep Indo-Pasifik ke dalam Buku Putihnya. Munculnya busur Indo-Pasifik yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik melalui Asia Tenggara dikaitkan dengan kebangkitan China dan India, negara aktif mereka, penetrasi ke kawasan tetangga, dan peningkatan arus perdagangan, investasi, dan energi.⁴³

Jepang Secara resmi Mengumumkan Konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka Oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada upacara pembukaan Konferensi Internasional Tokyo keenam tentang Pembangunan Afrika (TICAD VI) yang diselenggarakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 26 Agustus tahun 2016. Dalamnya, Abe menekankan kerjasama Afrika untuk mendorong pertemuan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Asia dan Afrika menjadi tempat yang lebih menghargai kebebasan, supremasi hukum dan ekonomi pasar. Strategi ini menyerukan Kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang menunjukkan bahwa Samudra Hindia dan Pasifik saling berhubungan dalam hal ekonomi dan keamanan.⁴⁴

Beberapa pemerintah menggunakan gagasan Indo-Pasifik sebagai landasan untuk menetapkan ruang strategis di mana mereka bertujuan mengejar kepentingan nasional mereka. Dalam konteks ini, dua negara yang menonjol adalah Jepang dan Amerika Serikat. Pertama, keduanya memiliki strategi Indo-

⁴³ Australian Government Department of Defence, *013. Defence White Paper*. Diakses dari https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1516/DefendAust/2013 (01/02/2024. 13.50 WIB)

⁴⁴ Ryo Nakamasu, 2018, *The History of 'Free and Open Indo-Pacific Strategy' in Japan*, policy science 12 (2018): 87–93. Diakses dari: https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/record/4681/files/jps_12_Nakamasu.pdf (15/05/2023. 20.18 WIB)

Pasifik yang terencana dengan baik, menjadi aktor kunci dalam wilayah tersebut, dan kebijakan mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan regional. Kedua, Jepang dan Amerika Serikat terikat oleh aliansi militer-politik, dan gagasan tentang Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka diusulkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2016, kemudian diadopsi oleh pemerintahan Trump pada tahun 2017-2018, dengan penggunaan frasa yang sama: Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.⁴⁵

Menurut Buku Biru Diplomasi Jepang 2017, pada konferensi tingkat tinggi di Nairobi, Abe mengumumkan "Strategi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka", menekankan dua aspek utama. Pertama, pentingnya laut bebas dan terbuka sebagai pilar perdamaian dan kemakmuran. Kedua, hubungan yang terjalin antara Asia, Timur Tengah, dan Afrika.⁴⁶ Buku Biru 2018 menekankan pentingnya menjaga tatanan maritim yang bebas dan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip mendasar seperti kebebasan berlayar dan supremasi hukum. Jepang berusaha menerapkan strategi Indo-Pasifik nya dengan menyediakan "barang publik internasional" untuk memperkuat stabilitas dan pembangunan di wilayah tersebut. Buku Biru 2019 tidak lagi mengacu pada "prinsip dasar", dan prinsip tersebut sendiri telah direvisi untuk memperhatikan pentingnya perdagangan bebas. Sejak akhir tahun 2018, pejabat Jepang mulai menggunakan istilah 'visi' sebagai ganti

⁴⁵ Anna A. Kireeva, 2020. *The Indo-Pacific in the Strategies of the U.S. and Japan Common and Distinctive Features, Implications for Russia*, *Russia in Global Affairs* 18, no. 3: 98–127. Diakses dari: <https://eng.globalaffairs.ru/wp-content/uploads/2020/09/098-127.pdf> (01/02/2024. 21.15 WIB)

⁴⁶ Ministry of Foreign Affairs (MOFA), 2021, *Japan's Effort for a 'Free and Open Indo-Pacific (FOIP).'* *Foreign Policy*. Diakses dari: <https://www.mofa.go.jp/files/100056243.pdf>. (13/01/2024. 22.01 WIB)

'strategi' dalam konteks kebijakan Jepang di wilayah Indo-Pasifik⁴⁷. Jepang telah mengadopsi strategi 'tactical hedging' yaitu melindungi secara opportunistic dan hanya dalam periode -periode tertentu berdasarkan beberapa kondisi yang memungkinkannya untuk secara fleksibel menggabungkan preferensi negara-negara regional lainnya ke dalam FOIP Jepang sehingga menjadikan konsep tersebut sebagai visi bersama di antara negara-negara regional dan sekitarnya, dan menciptakan koalisi untuk menghadapi ancaman dari Tiongkok.⁴⁸

2.3.2 Implementasi Kebijakan *Free Open Indo-Pacific* di Kawasan Indo-Pasifik

Implementasi Jepang atas rencana Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP) melibatkan beberapa upaya dan inisiatif dari berbagai pihak. termasuk mempromosikan diplomasi publik tentang tatanan maritim dan berbagi wawasan tentang hukum internasional, meningkatkan konektivitas, mendorong wilayah tersebut menjadi tempat yang menghargai kebebasan, supremasi hukum, dan bebas dari kekerasan atau paksaan, serta menjadikannya sejahtera.⁴⁹ Jepang juga menekankan peran Official development Assistance (ODA) atau Bantuan Pembangunan Resmi dalam mempromosikan FOIP. Upaya lain termasuk mempromosikan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur, meningkatkan

⁴⁷ Anna A. Kireeva, 2020. *The Indo-Pacific in the Strategies of the U.S. and Japan Common and Distinctive Features, Implications for Russia*, Russia in Global Affairs 18, no. 3: 98–127. Diakses dari: <https://eng.globalaffairs.ru/wp-content/uploads/2020/09/098-127.pdf> (01/02/2024. 21.15 WIB)

⁴⁸ Kei Koga, 2020, *Japan's 'Indo-Pacific' Question: Countering Tiongkok or Shaping a New Regional Order?*, Vol, 96, No, 1: 49–73, *International Affairs*, DOI: <https://doi.org/10.1093/ia/iiz241>

⁴⁹ Ministry of Foreign Affairs (MOFA), 2021, *Japan's Effort for a 'Free and Open Indo-Pacific (FOIP).'* *Foreign Policy*. Diakses dari: <https://www.mofa.go.jp/files/100056243.pdf>. (13/01/2024. 22.01 WIB)

kerja sama keamanan, dan meningkatkan konektivitas dalam berbagai aspek.⁵⁰ Secara ringkas, implementasi FOIP oleh Jepang melibatkan kombinasi upaya diplomatis, ODA, dan kerja sama dalam berbagai bidang untuk mempromosikan konektivitas, kemakmuran, dan supremasi hukum di wilayah Indo-Pasifik.

Mengamankan kebebasan navigasi di laut merupakan salah satu prioritas utama FOIP. Meskipun Jepang tidak secara langsung bergabung dengan Operasi Kebebasan Navigasi (FONOPS) yang dipimpin AS, MSDF Jepang telah sering melakukan kunjungan pelabuhan atau melakukan pelatihan militer bersama dengan negara-negara Asia Tenggara dan Samudra Hindia sejak 2015.⁵¹ Pada tahun 2017, Maritime Self-Defense Force, MSDF memulai pengiriman kapal perusaknya dalam jangka panjang (sekitar dua hingga tiga bulan) untuk meningkatkan kemampuannya operasionalnya dan untuk mempromosikan kerja sama dan interoperabilitas dengan angkatan laut mitranya di Indo-Pasifik. Operasi itu disebut 'Indo Southeast Asia Deployment (ISEAD)' pada 2018 dan berganti nama menjadi 'Indo-Pacific Deployment (IPD)' pada 2019. IPD 2019 (atau IPD19) termasuk kapal perusak terbesar MSDF Izumo (DDH183) dan Murasame (DD101) dengan empat pesawat berbasis kapal induk.

Tidak hanya MSDF, tetapi Air Self-Defense Force (ASDF) dan Ground Self-Defense Force (GSDF) juga meningkatkan operasinya di Indo-Pasifik. Pesawat pengintai dan transportasi ASDF seperti P-3C dan C2 kadang-kadang

⁵⁰ Ministry of Foreign of Affairs, 2023, *New Plan for a 'Free and Open Indo-Pacific (FOIP)*, diakses dari https://www.mofa.go.jp/fp/pc/page3e_001336.html (07/04/2023, 21.28 WIB)

⁵¹ Tomohiko Satake, 2017, *Chapter 8 Japan: Expanding Strategic Horizons* (n.d.). Diakses dari: https://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2017/east-asian_e2017_08.pdf (21/04/2023, 19.02 WIB)

dikirim untuk melakukan latihan bersama atau program pertukaran dengan negara-negara Asia Tenggara, Oseania, atau Samudra Hindia.⁵² GSDF juga melakukan latihan kontra-terorisme dengan India untuk pertama kalinya antara Oktober dan November 2018. Sebagian besar kegiatan peningkatan kapasitas SDF, yang akan dibahas lebih lanjut, dilakukan oleh personel GSDF. Brigade Penyebaran Cepat Amfibi Jepang, yang baru dibentuk di bawah GSDF pada Maret 2018, bergabung dengan IPD19 untuk melakukan pertukaran pertahanan dengan tentara dan marinir regional.

Jepang juga telah mempromosikan Quadrilateral Security Dialogue atau dsingkat QUAD, serta memperkuat kerja sama keamanan bilateral dan trilateral dengan Australia dan India, dengan tujuan yang sama. Jepang berpartisipasi dalam latihan gabungan AS-India Malabar pada tahun 2017.⁵³ Sejak pengumuman Menteri Luar Negeri Taro Kono untuk merevitalisasi QUAD pada November 2017, pejabat senior Jepang, AS, Australia, dan India telah bertemu empat kali (hingga Mei 2019), dan telah bertukar pendapat untuk mempromosikan negara yang bebas, terbuka, dan inklusif di Indo-Pasifik. Pada September 2019, para menteri luar negeri keempat negara untuk pertama kalinya mengadakan pertemuan di New York.

Meskipun negara-negara di kawasan Indo-Pasifik telah mengalami

⁵²Tomohiko Satake and Ryo Sahashi, 2020, *The Rise of Tiongkok and Japan's 'Vision' for Free and Open Indo-Pacific* *The Rise of Tiongkok and Japan's 'Vision' for Free and Open Indo Pacific*, Journal of Contemporary Tiongkok 00, no. 00: 1–18, DOI:<https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1766907>.Ibid.

⁵³ Yuichi Hosoya, 2019, *FOIP 2.0: The Evolution of Japan's Free and Open Indo-Pacific Strategy*. *Asia-Pacific Review*. 26, no. 1: 18–28. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/13439006.2019.1622868> 21: 18-28: 18–28.

pertumbuhan yang signifikan, mereka masih menghadapi sejumlah risiko dan ancaman, seperti terorisme, bencana alam, penangkapan ikan ilegal, kejahatan transaksional, ancaman dunia maya, dan beragam masalah domestik seperti korupsi, ketidakstabilan pusat ekonomi, dan politik. Kerentanan tersebut dapat dengan mudah mengarah pada ketidakstabilan atau konflik regional yang merusak tata kelola yang stabil. Oleh karena itu, mengurangi kerentanan negara-negara di wilayah tersebut dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta mandiri merupakan salah satu prioritas utama dari visi FOIP. Hal ini menjelaskan peningkatan Capacity-Building Assistance (CBA) atau Bantuan Kerja Sama Jepang di negara-negara Indo-Pasifik. Upaya peningkatan kapasitasnya mencakup berbagai kegiatan mulai dari keamanan maritim hingga bantuan kemanusiaan/bencana, kontra-terorisme, operasi pemeliharaan perdamaian, dan keamanan dunia maya atau luar angkasa. Jepang juga memperluas cakupan CBA-nya dari Asia Tenggara hingga Pasifik Selatan, Samudra Hindia, Asia Tengah, dan Afrika. Kegiatan peningkatan kapasitas ini terkadang dilakukan dalam kerja sama erat dengan negara-negara mitra, terutama AS dan Australia.⁵⁴

Penting untuk dicatat bahwa Bantuan Kerja Sama Jepang difokuskan pada penguatan kapasitas maritim negara-negara yang menghadapi China secara langsung, seperti Filipina atau Vietnam. Meskipun demikian, sebagian besar program CBA Jepang berfokus pada keamanan non-tradisional, bukan tradisional, dan tersebar di wilayah Indo-Pasifik karena direncanakan dan dilaksanakan

⁵⁴ ministry of Defense, *MOD's 2017, Capacity-Building Assistance in Timor-Leste*, n.d. Diakses dari https://www.mod.go.jp/en/d_act/exc/cap_b/timor_leston/20171009.html (20/01/2024. 20.30 WIB)

berdasarkan permintaan negara penerima, bukan atas inisiatif atau kepentingan Jepang. Program CBA Jepang tidak secara spesifik ditujukan kepada China; sebaliknya, intinya adalah menciptakan kawasan yang cukup tangguh untuk menghadapi kebangkitan China.

Kerjasama alutsista dan teknologi Jepang dengan negara-negara kawasan juga penting untuk meningkatkan ketahanan kawasan. Setelah memperkenalkan Tiga Prinsip baru tentang Alih Peralatan dan Teknologi Pertahanan pada tahun 2014, serta mengumumkan Piagam Kerjasama Pembangunan yang baru pada tahun 2015, Jepang semakin mempromosikan kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan dengan negara-negara seperti Australia, India, Filipina, Vietnam, Thailand, Indonesia, Selandia Baru, Inggris, dan Prancis. Tidak seperti ekspor senjata negara lain, transfer alutsista Jepang tidak semata-mata didorong oleh tujuan komersial.⁵⁵ Sebaliknya, diperbolehkan ketika berkontribusi untuk promosi aktif kontribusi perdamaian dan kerjasama internasional, serta keamanan Jepang. Oleh karena itu, CBA adalah salah satu tujuan utama kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan Jepang.

⁵⁵ Tomohiko Satake and Ryo Sahashi, 2020, *The Rise of Tiongkok and Japan's 'Vision' for Free and Open Indo-Pacific* *The Rise of Tiongkok and Japan's 'Vision' for Free and Open Indo Pacific*, Journal of Contemporary Tiongkok 00, no. 00: 1–18, DOI:<https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1766907>.Ibid.